

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisir dan pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan standar hidup yang memuaskan dan menjalin relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepuh mungkin dan meningkatkan kesehatannya selaras dengan kebutuhan masing-masing individu, kelompok dan masyarakat.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang sudah terorganisir dan sistematis di lengkapi dengan berbagai macam keterampilan-keterampilan ilmiah, tentunya suatu konsep yang relatif berkembang, terutama di Negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan bentuk permasalahan yang sudah lama ada sepanjang dalam kehidupan manusia, oleh karena itu masyarakat memerlukan sistem kesejahteraan sosial yang lebih teratur untuk mencegah masalah sosial yang dirasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan system pelayanan sosial yang memadai dan teratur.

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Definisi kesejahteraan sosial lainnya menekankan bahwa

kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya yang tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsep, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmanah, rohaniyah, dan sosial.
2. Institusi arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelayanan-pelayanan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan meningkatkan angka sejahtera.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan

mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.(Friedlander, dalam Fahrudin 2018)

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. (Friedlander, dalam Fahrudin 2018)

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial baik individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, tentunya dengan mengurangi berbagai tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kesejahteraan sosial disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha-usaha kesejahteraan sosial seringkali disamakan. UU RI Nomor Tahun 1974 memberi batasan mengenai keduanya. Usaha kesejahteraan sosial menurut undang-undang tersebut adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

Tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercemin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok, norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orangtua dan peranan pria dan wanita, norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya, kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula. (Schiderman, dalam Fahrudin 2018)

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi utama dari kesejahteraan sosial yaitu telah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar terciptanya kehidupan yang jauh lebih baik, fungsi kesejahteraan sosial lainnya mengenai peningkatan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan tujuan yang baik dalam usaha kesejahteraan sosial dalam skala pengembangan dan pembangunan sosial.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah

tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Friedlander & Apte dalam Fahrudin 2018)

2.1.4 Kecenderungan Kesejahteraan Sosial

Perkembangan konsep kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang dewasa ini memberi implikasi kepada kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut :

(1) Pergeseran dari sistem lembaga ke sistem masyarakat

Pada masa lampau, kegiatan kesejahteraan sosial umumnya dijalankan di dalam lembaga pelayanan seperti panti. Keadaan ini telah mengalami perubahan dimana kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial lebih banyak berorientasi kepada masyarakat (*community based services*). Hal ini bukan berarti lembaga pelayanan atau panti tidak diperlukan lagi. Inti kegiatan berbasis masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pelayanan atau kegiatan panti, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

(2) Profesionalisasi

Hampir di negara berkembang khususnya dalam lingkup ASEAN dewasa ini sudah semakin menyadari bahwa kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial harus berada di bawah kepemimpinan dan supervise para ahli pekerjaan sosial yang memiliki kualifikasi, selain profesi lain sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.

(3) Partisipasi masyarakat

Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial pada tingkatan mana pun memerlukan partisipasi masyarakat. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan semakin meningkat partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan kesejahteraan sosial.

(4) Modernisasi

Salah satu ciri khas masyarakat modern adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya melalui perencanaan yang sistematis. Harus diakui modernisasi di bidang kesejahteraan sosial di bidanh kesejahteraan

sosial di Indonesia relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dengan modernisasi, dapat ditentukan standar pelayanan yang dapat memberikan kepuasan klien akan pelayanan dan akurasi pelayanan dengan masalah yang dihadapi klien.

(5) Peningkatan Tanggung jawab Pemerintah

Sejak tahun 1970-an pemerintah di berbagai negara berkembang khususnya telah menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

(6) Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional dalam kegiatan kesejahteraan sosial khususnya di negara-negara berkembang semakin meningkat. Bantuan dana dari negara lain dan badan-badan PBB dan bantuan teknis ditunjukkan untuk meningkatkan mutu dan tingkat pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang dapat diterima di seluruh dunia.

(7) *Indigenisasi* (Pemanfaatan unsur lokal)

Proses bantuan internasional bagaimanapun disadari telah membawa apa yang dinamakan "*professional imperialisme*" yaitu bentuk penjajahan baru yang bertamengkan profesionalisme. Kesadaran baru khususnya di negara-negara berkembang adalah kesadaran untuk menggunakan unsur-unsur budaya lokal dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial dan penerapan praktik pekerjaan sosial. (Midgley, dalam Fahrudin 2018)

1.1.5 Bidang-bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Secara subnatif bidang kesejahteraan sosial atau bisa juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik pekerjaan sosial, terdiri dari berbagai cangkupan yang saling terkait erat antara lain :

- (1) Kesejahteraan anak dan keluarga
- (2) Kesejahteraan remaja dan generasi muda
- (3) Kesejahteraan orang lanjut usia
- (4) Pelayanan Kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services*)
- (5) Pelayanan rekreasional
- (6) Pelayanan sosial koreksional
- (7) Pelayanan kesehatan mental
- (8) Pelayanan sosial medis
- (9) Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
- (10) Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan

1.2 Konsep Pekerjaan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang diantaranya seperti, kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu *institusi sosial*, suatu *profesi* pelayanan manusia dan suatu seni *praktik* teknik dan ilmiah. Dalam meta-institusi kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial mempunyai posisi pokok dan sejumlah fungsi dasar yang merupakan tugas-tugas kemasyarakatan. Fungsi-fungsi inti dan pelayanan-pelayanan pertolongan khusus dalam sistem kesejahteraan sosial dalam bentuk apa yang disebut sebagai praktik pekerjaan sosial. (Siporin, dalam Fahrudin 2018)

1.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial (*Social worker*) merupakan profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok ataupun masyarakat yang membutuhkan. Pekerjaan sosial juga bisa dimaknai sebagai profesi pelayanan sosial yang bermuara pada kerja kemanusiaan atau bisa disebut dengan istilah *helping profession*. Pekerja sosial juga bisa dijumpai dengan berbagai situasi seperti penanganan kemiskinan, penanggulangan bencana, penanganan orang dengan kecacatan, perlindungan anak, pengembangan masyarakat dan masih banyak lagi.

Definisi pekerjaan sosial internasional yang baru diterima oleh *the Internatioanal Federation of Social Workers (IFSW)* dan yang dibenarkan oleh *NASW* adalah sebagai berikut :

Profesi sosial mempromosikan pemecahan masalah perubahan sosial dalam hubungan manusia dan pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Memanfaatkan teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial mengintervensi pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang mendasar bagi pekerjaan sosial. (dalam DuBois & Miley, 2005)

Artinya : Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

1.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan pekerjaan sosial memiliki fungsi membantu individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah, mendekatkan mereka dengan sistem sumber dan mempermudah interaksi mereka dengan lingkungan sosial, menciptakan hubungan baru dengan mereka seperti sistem sumber kemasyarakatan, memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan lingkungan sosial.

Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka
3. sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
4. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
5. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

6. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
7. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
8. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
9. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam. (Zastrow, dalam Fahrudin 2018)

1.2.3 Intervensi Pekerjaan Sosial

Kehadiran profesi pekerjaan sosial di tengah-tengah masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu kelompok, maupun masyarakat yang kemudian setiap kegiatan difokuskan kepada hubungan sosial klien yang melakukan intervensi dengan lingkungan dimana mereka hidup. Hal ini sejalan dengan memaparkan pengertian pekerjaan sosial

Pekerja sosial adalah profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, dimana tujuannya untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam menyesuaikan diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya melalui penggunaan metode-metode Pekerjaan Sosial. (Scrafia dalam Amin 2014)

Berkenaan dengan pernyataan tersebut maka terdapat keterkaitan yang erat antara pelaksanaan dalam advokasi dengan profesi pekerjaan sosial. terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pekerjaan sosial sebagai fasilitator, *broker*, *mediator*, pembela, dan pelindung. Lima peran ini sangat penting diketahui oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat yang sedang memiliki permasalahan.

1.2.4 Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial adalah suatu sumber prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang

digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh pekerja sosial sebagai berikut :

a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*)

Bimbingan sosial perorangan menurut Hellen Harris Perleman (2011) yang dikutip yaitu menyatakan bahwa *casework* ialah membantu individu dalam mengadakan adaptasi sosial, serta memulihkan dan memperkuat kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dalam hal ini pekerja sosial harus berusaha mempengaruhi klien.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang di dapat individu tersebut melalui pendekatan untuk menghubungkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang pekerja sosial harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menjadi relasi pekerja sosial klien.

Prinsip dasar pada bimbingan sosial perorangan adalah :

1. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghotmati penerimaan pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
2. Komunikasi, pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
3. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.

4. Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
5. Kerahasiaan diri, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan yang profesional.

b. Bimbingan Sosial kelompok (*Social Group Work*)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi adanya fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi, bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok yaitu :

Social Group Work adalah suatu metode untuk bekerja dengan, dan menghadapi orang-orang didalam suatu kelompok, guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya, serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. (Wibhawa, dalam Yulia 2019)

Berdasarkan definisi di atas metode untuk yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah

1. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan

pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.

2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Dimana bimbingan sosial kelompok tujuan perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
3. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja dengan fungsinya.
6. Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri.

Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

c. Sosial Masyarakat (*Community Social Guidance/Community Organization Community Development*)

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga kesejahteraan anak dan lain sebagainya.

Pengertian *Community Development* yaitu

Suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. (Soetomo dalam Hasanah, L. Putri 2019)

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah

- 1) Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
- 2) Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
- 3) Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.

- 4) Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

1.3 Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk melaksanakan peran sosial seperti yang di nilai yang ada di masyarakat, peranan merupakan seperangkat harapan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan individu, kelompok atau masyarakat pada status tertentu. Keberfungsian sosial juga mengacu pada cara yang dilakukan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya, keberfungsian sosial merujuk pada individu dan kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas dan sebagainya.

Keberfungsian sosial merupakan fokus utama pekerjaan sosial. Menurut Barlett keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan mengatasinya oleh individu. Kalau terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kemampuan mengatasi yang dimiliki individu. Dalam hal ini pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya oleh individu. (Bartlett, dalam Fahrudin 2018)

1.4 Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial sering diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara dan

memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Peran pekerja sosial juga membantu individu, kelompok atau masyarakat ketika mereka membutuhkan bantuan dan selain itu juga peran pekerja sosial juga memberikan saran, motivasi dan semangat kepada orang yang membutuhkan pekerja sosial tersebut.

Ada tujuh peran yang yang dijalankan oleh *community worker* hasil intervensi komunitas, dimana ketujuh peran yang dilaksanakan itu adalah sebagai : Pemercepat perubahan (*Enabler*), perantara (*Broker*), pendidik (*Educator*), tenaga ahli (*Expert*), peran perencana sosial (*Social Planner*), pembela atau advokat (*Advocate*) dan berperan sebagai (*Akivist*).

Pertama, sebagai *enabler* bahwa seorang *community worker* membantu masyarakat dalam tiga aspek sekaligus, yakni agar masyarakat mampu mengartikulasikan kebutuhan sosialnya, agar masyarakat mampu mengidentifikasi masalah sosial yang sedang dihadapi, serta agar masyarakat mampu mengembangkan kapasitas dirinya sehingga dapat menangani masalah tersebut secara efektif.

Kedua, berperan sebagai seorang broker atau perantara dalam proses intervensi sosial, hal tersebut berkaitan erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*), tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut, dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.

Ketiga, dalam menjalankan peran pendidik (*educator*), seorang *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta pesannya mudah ditangkap yang menjadi sasaran perubahan. Di samping itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan.

Keempat, dalam menjalankan peran selaku tenaga ahli (*expert*), seorang *community worker* dapat memberikan masukan, saran dukungan informasi dalam berbagai situasi. Untuk itu, tenaga ahli diharapkan dapat memberikan usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan dalam suatu organisasi tertentu dalam menangani masalah lingkungan, memilih kelompok-kelompok mana yang harus mewakili, atau memberikan masukan mengenai isu apa yang pantas dikembangkan dalam suatu komunitas ataupun organisasi tertentu.

Kelima, dalam menjalankan peran selaku perencanaan sosial, seorang *community worker* harus mengumpulkan banyak data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas maupun kelompok masyarakat, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam menangani berbagai masalah tersebut.

Keenam, menjalankan peran selaku Advokat atau berperan sebagai pelindung hukum. Disini seorang *community worker* membantu masyarakat atau kliennya dalam memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan, sumber daya, perlindungan dan pendampingan dalam kasus pelanggaran hukum serta mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah atau membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Ketujuh, menjalankan peran selaku aktivis atau *community worker* selaku pembela yang mencoba melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah mengalihkan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang berkurang beruntung (*disadvantaged group*) atau kelompok masyarakat yang marjinal dari aspek sumber dayanya. (Adi, dalam Iskandar 2019)

1.5 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik. Pelecehan seksual pun juga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui fisik atau non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa melihat gender dan juga usia. Berbagai data memang menunjukkan kasus pelecehan seksual dengan korban wanita dan pelaku pria memang lebih banyak, tetapi pada dasarnya pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual.

Hal isatu ini pastinya sudah dialami oleh kebanyakan perempuan pada umumnya. *Catcalling* adalah perlakuan berupa siulan, panggilan, seruan, atau apaun yang sifatnya verbal dengan tendensi seksual, kepada perempuan (atau gender lain, tapi pada umumnya perempuan) yang sedang lewat. Hal tersebut sulit sekali dihindari, apalagi jika perempuan tersebut memiliki paras yang cantik atau berpenampilan menarik. Mengenali pelecehan seksual itu seperti apa, menurut Komnas Perempuan peleceha merupakan salah satu dari 15 jenis kekerasan seksual

Apabila mengalami hal pelecehan, sebaiknya bersikap tegas dan tunjukan ekspresi ketidaksukaan kamu terhadap hal tersebut. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam saja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Berikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus dan lihat dulu dimana situasi pelecehan tersebut terjadi. Penting untuk mengetahui konteks latar belakang tempat dimana pelecehan tersebut terjadi.

Dengan mengetahui konteks tempat kita bisa mencari tahu siapa yang berwenang di tempat tersebut.

Kalau kita sudah mengetahui siapa yang berwenang, maka kita bisa mengetahui kemana harus melaporkan oknum yang melakukan pelecehan. Bersikap tegas dan berani memberikan teguran, ingatkan atau ancam pelaku. Biasanya pelecehan seksual berupa sentuhan beberapa bagian tubuh dan sebagai perempuan rawan sekali terjadi ketika terdapat banyak orang yang berdesak-desakan seperti di bis atau kereta. Jika hal terjadi segeralah berganti posisi tegur secara tegas dan lantang agar ia merasa di permalukan dan orang disekitar pun akan ikut memperhatikannya.

Laporkan tindakan tersebut pada pihak yang berwenang, laporkan tindakan pelecehan tersebut pada pihak yang berwenang, bisa pada pejabat institusi tempat pelaku bekerja atau layanan pengaduan khusus di kantor polisi (ruang pelayanan khusus dibawah divisi reakta). Tidak melaporkan tindakan tersebut sama saja dengan membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, ingat bahwa satu kasus pelecehan belum tentu hanya melibatkan satu korban bisa saja ada korban lain yang tidak mau melapor karena malu harga dirinya sudah direndahkan. (Danila Amani, dalam Among Karta 2016)

1.6 Pemulihan dan Rehabilitasi

1.6.1 Pemulihan

Pemulihan adalah memperbaiki atau mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya konflik, konflik juga dapat mengakibatkan kekerasandan tentu saja sangat merugikan berbagai pihak, baik dari segi material maupun psikis. Karena dibutuhkananya *recovery* atau pemulihan pasca konflik.

1.6.2 Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, yang tadinya dalam keadaan baik akan tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi

1. Pengertian Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, dan nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah

sakit atau korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.

Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat yaitu :

1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.
2. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangkanya (*client centered*). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim (*provider centered*).
3. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial dimana ia hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang.

4. Bidang layang rehabilitasi, adalah pada aspek, medik, sosial dan keterampilan.
 - a. Usaha rehabilitasi di bidang medik meliputi aspek medik pada umumnya maupun aspek medik yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang disandang, agar menjadi berfungsi dan mencegah kemungkinan terjadinya akumulasi kejiwaan yang lebih berat.
 - b. Usaha rehabilitasi di bidang sosial, mencangkup eksistensi diri sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi, dimaksudkan sebagai upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas, kemampuan bercita-cita, berkasa dan berkarya. Usaha rehabilitasi juga dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri, penyesuain diri dengan lingkungan, suasana kerjasama, jiwa gotong-royong, sikap tegangg rasa, sikap menghargai orang lain, mengenal berbagi corak hubungan antar personal, ketahanan terhadap keadaan dan sebagainya.
 - c. Usaha rehabilitasi di bidang keterampilan meliputi usaha menanamkan, memupuk dan mengembangkan keterampilan peserta didik melalui latihan keterampilan, peserta didik melalui latihan keterampilan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan produktif.
5. Bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik.

2. Jenis – Jenis Rehabilitasi

Jenis-jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasi. Jenis-jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

a. Rehabilitasi Medis

Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan-gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik motor dan penyesuaian sosial. rehabilitasi medis meliputi bidang layanan fisioterapi, *speech therapy*, *occupational therapy*, ortotik protetik. Tenaga-tenaga ahli yang menangani bidang tersebut adalah tenaga-tenaga profesi ahli madya yang dihasilkan oleh Departemen Kesehatan. Masing-masing tenaga tersebut berperan sebagai tenaga administrator, konsultan, dan manajemen bidang rehabilitasi. Adapun peranan guru pendidikan khusus sebagai mitra kerja, membantu memberikan latihan-latihan dasar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, terutama apabila tenaga-tenaga tersebut belum ada lingkungan sekolah.

b. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan adalah layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik, yaitu baca, tulis, dan hitung). Lembaga pendidikan individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Lembaga ini umumnya diselenggarakan oleh swasta dan pemerintah di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional.

c. Rehabilitasi Sosial

Dinas sosial mempunyai program melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama di pedesaan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

d. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan agar layanan rehabilitasi dapat dilakukan sedini mungkin dan merata bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Tenaga profesional rehabilitasi keberadaannya belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara merata. Orang yang membutuhkan layanan khusus tidak hanya berada di perkotaan.

e. Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan. Keterampilan yang ditawarkan kepada mereka sifatnya individu, sesuai dengan kemampuan yang masih dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar individu tersebut.

Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidup secara baik, benar dan mulia.

2. Fungsi Pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap manusia agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan.

3. Fungsi Analisis ke Depan

Sesungguhnya dengan ilmu ini seseorang akan memiliki potensi dasar untuk melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa, kejadian dan perkembangan.

4. Fungsi Pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental dan spiritual atau mentalnya.

5. Fungsi Penyembuhan atau Perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan mental, spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci.

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3971/3/104411001_bab2.pdf

Rehabilitasi para korban adalah bahwa tujuan yang mau dicapai dari setiap tahapan rehabilitasi tidak lain untuk kesembuhan total para korban. Karena itu mereka harus menyadari pula bahwa setiap korban itu punya perasaan mereka dan oleh karena itu korban harus dihargai dan dilayani.(Vismidia, dalam Prastowo G 2006)

Rehabilitasi para korban yang dimaksud bertujuan untuk bisa memecahkan suatu masalah dan bisa membantu dalam penanganan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya rehabilitasi yang dimana berusaha untuk memulihkan klien agar

bisa kembali hidup normal, sehat dan jasmani maupun rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya maupun pengetahuannya, kepadandaian, pergaulan dalam lingkungan hidup maupun dengan lingkungan keluarga.